KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sejumlah Perusahaan Langgar Norma
Tanggal : Jumat, 10 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

PROGRAM MAGANG

Sejumlah Perusahaan Langgar Norma

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Ketenagakerjaan berjanji segera mengevaluasi program Magang Nasional yang akan selesai pada April 2026.

"Sejauh ini, kami sudah melakukan evaluasi tetapi belum komprehensif," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR, Kamis (9/4/2026), di Jakarta.

Yassierli menjelaskan, dari hasil evaluasi sementara, pihaknya menemukan sejumlah perusahaan tempat magang melanggar norma ketenagakerjaan. Perusahaan itu sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam (*blacklist*) sesuai aduan peserta.

Program Magang Nasional dengan kompensasi upah minimum kabupaten/kota (UMK) merupakan salah satu dari delapan paket ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran untuk membayar kompensasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah menetapkan kuota sebesar 100.000 orang lulusan perguruan tinggi yang lulus maksimal satu tahun sebelum program berjalan. Dari kuota itu, pemerintah membaginya ke dalam angkatan IA, IB, II, dan III.

Total peserta Magang Nasional angkatan IA mencapai 14.952 orang. Mereka menjalani magang enam bulan dari 20 Oktober 2025 sampai 19 April 2026. Sementara itu, angkatan IB yang berjumlah 1.160 orang melakoni magang dari 24 Oktober 2025 sampai 23 April 2026.

Angkatan II mencapai 62.128 peserta dan magang mulai dari 24 November 2025 sampai 23 Mei 2026. Adapun angkatan III tercatat 24.456 peserta dan magang dari 16 Desember 2025 sampai 15 Juni 2026.

Meski total kuota tahun 2025 sebanyak 100.000 orang ini mulanya terserap, Yassierli mengakui dalam perjalanannya terdapat peserta yang mengundurkan diri. Jadi, untuk menggenapi lagi malah terjadi kelebihan peserta yang diterima menjadi 102.696 orang.

Kemudian, dari 102.696 peserta Magang Nasional 2025 angkatan I-III, terdapat 4.238 peserta tidak aktif dan 90.131 orang masih aktif.

Yassierli optimistis program Magang Nasional bisa terus dilanjutkan. Alasannya, program ini menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi dan paparan dunia kerja bagi lulusan perguruan tinggi.

"Saya memiliki usulan agar tahun anggaran 2026, total kuota peserta Magang Nasional naik menjadi 150.000 orang. Usulan ini sudah saya sampaikan kepada Presiden, tetapi masih menunggu ketersediaan anggaran dan dukungan Kementerian Keuangan atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," katanya.

Penyerapan karyawan

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Edy Wuryanto, menilai, program Magang Nasional dengan kompensasi UMK harus direspons positif. Program ini menjadi jembatan dunia pendidikan dan dunia kerja.

Namun, dia belum melihat sikap pemerintah yang siap membuka data sementara mengenai berapa banyak peserta Magang Nasional yang diserap menjadi karyawan.

Anggota Komisi IX DPR lainnya memiliki pandangan senada. Mereka sepakat bahwa keberhasilan program Magang Nasional bukan diukur dari banyaknya peserta, melainkan persentase peserta yang terserap di dunia kerja.

"Kalau perlu, Kemenaker membuat ketentuan wajib minimal penyerapan karyawan bagi perusahaan yang bersedia menjadi tempat magang," ujar Gamal Albinsaid, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Indah Kurnia, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengatakan, kelompok usia produktif menjadi penyumbang signifikan porsi angka pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, program Magang Nasional semestinya dibaca sebagai salah satu cara mengurai masalah tersebut.

"Semua kebijakan pemerintah yang diambil saat ini semestinya berorientasi pada pembukaan lapangan pekerjaan. Masalah pengangguran yang berkepanjangan bisa berdampak ke kriminalitas," kata Indah.

Secara terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Tauhid, berpendapat, program Magang Nasional harus dirancang dengan tujuan yang jelas, berorientasi pada keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja, serta dilengkapi mentor dan keluaran (*output*) kompetensi yang terukur.

Jumlah peserta tidak boleh dipaksakan karena kapasitas pembinaan setiap kantor terbatas. Jika pendaftar membeludak, pemerintah sebaiknya memperluas posisi magang ke berbagai sektor dan daerah.

"Program Magang Nasional sebaiknya tidak semata-mata dipakai untuk merespons sempitnya lapangan kerja. Masalah sempitnya lapangan pekerjaan sebaiknya direspons dengan strategi yang lebih besar. Memperkuat pendidikan vokasi dan magang yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri adalah salah satunya," ujarnya. (MED)

PERPUSTAKAAN DPR RI